

BAGIAN 1

PENDAHULUAN :

PRINSIP KESATUAN SOSIAL

1.1 Pengantar

Merupakan awal dari isi buku yang akan membahas secara keseluruhan yang harus dipahami, terutama oleh mahasiswa, sehingga setiap awal dari bab perlu adanya tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dengan demikian, bahwa buku ini sangat bermanfaat pula bagi setiap pembaca yang tidak terbatas hanya kepentingan perkuliahan tetapi bagi siapa saja yang berminat mengenai kehidupan manusia Indonesia.

1.2 Prinsip Dasar

Suatu sistem dibangun oleh komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Sistem kemasyarakatan terbentuk karena adanya saling hubungan di antara komponen-komponen yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga membentuk suatu kesatuan, atau suatu integrasi. Apa yang menjadi dasar terjadinya integrasi itu ? Integrasi yang terjadi dalam suatu masyarakat berdasar pada *kesepakatan* atau *konsensus* para anggotanya terhadap keberadaan nilai-nilai tertentu, atau didasarkan pada *general-agreements* yang memiliki kekuatan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Secara fungsional masyarakat selalu memperlihatkan sebagai suatu sistem yang terintegrasi ke dalam bentuk *equilibrium* atau *stabilitas*. Pandangan ini, dikenal dengan sebutan *integration approach*, *order approach*, atau *equilibrium approach*, dan lebih terkenal lagi dengan sebutan *structural-functional* (fungsionalisme struktural).

Pendekatan-pendekatan tadi memandang masyarakat sebagai *organisme biologis* (organismic-approach) sebagaimana Laeyendecker (1983 : 205) mengemukakan,

Perbandingan dengan organisme, menurut Spencer, didasarkan atas paralelisme di dalam pengaturan komponen-komponennya. Paralelisme itu oleh Spencer ditunjukkan pada lima aspek. Baik organisme maupun masyarakat bercirikan pertumbuhan; kedua-duanya mengenal peningkatan differensiasi struktur dan spesialisasi fungsional. Dari kenyataan ini kemudian timbullah integrasi. Dalam kedua-duanya, keseluruhan tetap ada sementara komponen-komponennya diganti dan komponen-komponen ini menyumbang demi tetap tegaknya keseluruhan. Masih pula dapat ditambahkan bahwa kedua-duanya mengenal prinsip mengatur diri, dalam organisme terletak pada sistem syaraf, sedangkan dalam masyarakat pada sistem-sistem pengatur.

Dengan demikian, bahwa masyarakat melalui komponen-komponennya selalu mencari keseimbangan, apabila terdapat komponen yang tidak bekerja secara fungsional maka diganti dengan komponen baru agar integrasi tetap dapat

dipertahankan.

Sebagaimana organisme, bahwa masyarakat mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang kompleks secara evolusi, terutama dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, kemudian terjadi penggabungan satuan-satuan sosial yang disertai dengan peningkatan diferensiasi struktural, akhirnya terjadi tahapan evolusi sesuai dengan tipe-tipe masyarakat. Spencer membagi masyarakat menjadi dua bagian yang satu sama lain saling terlepas. Pertama mengatur masyarakat itu menurut ukurannya, *kedua* menyebutkan masyarakat terbagi menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat majemuk, kemudian terjadi majemuk lipat dua, majemuk lipat tiga, dst. Evolusi sosial yang dikemukakan Spencer membedakan pula tipe-tipe masyarakat, yaitu masyarakat militer dan masyarakat industri, yang didahului oleh masyarakat primitif. (Laeyendecker, 1983 : 203-204)

Puncak perkembangan pemikiran mengenai masyarakat dan kehidupannya yang terintegrasi dan berkesinambungan sebagaimana Talcott Parsons dan beberapa penganut fungsionalisme-struktural memiliki anggapan dasar seperti dikemukakan Dahrendorf (1986 : 196) berikut ini,

Setiap masyarakat secara relatif adalah tetap, struktur unsur-unsurnya relatif stabil;

- (1) Setiap masyarakat tersusun dari unsur-unsur yang terintegrasi secara baik;
- (2) Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, yakni memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan keutuhannya sebagai sebuah sistem;
- (3) Setiap fungsi struktur sosial didasarkan atas konsensus terhadap nilai-nilai di antara anggota-anggotanya.

Bahwa masyarakat agar tetap terus dapat bertahan dan berkembang memerlukan stabilitas; setiap masyarakat memiliki berbagai komponen yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dengan adanya integrasi sehingga membentuk kesatuan yang utuh; keutuhan masyarakat ini harus terus terpelihara melalui komponen masyarakat yang menjalankan fungsi-masing dalam bentuk koordinasi, karena masyarakat sendiri sebagai sebuah sistem; setiap komponen masyarakat memiliki keinginan untuk menjunjung nilai bersama sebagai konsensus. Dengan demikian, bahwa keempat anggapan dasar masyarakat tersebut merupakan awal dari pemikiran terbentuk integrasi di masyarakat.

Selanjutnya pendekatan fungsionalisme struktural yang dikembangkan Parsons dan pengikutnya, dapat dikaji kembali melalui anggapan dasar, seperti yang dikemukakan Berghe (dalam Nasikun, 1991 : 11 – 12) sebagai berikut,

- 1) Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain;
- 2) Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik;
- 3) Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis : menanggapi perubahan yang

datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat minimal;

- 4) Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya dapat teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah dicapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu;
- 5) Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenal bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial-budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan;
- 6) Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi tiga macam kemungkinan : penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan yang datang dari luar (extra systemic change); pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional; serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
- 7) Faktor yang paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat, demikian menurut pandangan fungsionalisme struktural selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap mana sebagian besar anggota masyarakat menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial-budaya itu sendiri.

Masyarakat sebagai sebagai sistem dikemukakan oleh Amirin (1989 : 2) sebagai berikut,

Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau himpunan benda-benda (manusia sebagai individu) yang disatukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; sesuatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan terpadu; suatu keseluruhan yang terorganisasikan, atau suau yang organik; atau juga yang berfungsi, bekerja atau bergerak secara serentak bersama-sama, bahkan sering Bergeraknya itu mengikuti kontrol tertentu. ...

Dengan demikian, bahwa sistem sosial pada hakekatnya adalah sistem dari tindakan-tindakan yang dilakukan bersama-sama. Sistem sosial terbentuk sebagai konsekuensi atau hasil dari interaksi sosial yang memiliki ciri,

- 1) Terjadi di antara berbagai individu;
- 2) Tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan tetapi bertumpu di atas standar penilaian umum yang disepakati oleh semua anggota masyarakat ybs..

Agar sistem sosial berjalan dan melaksanakan fungsinya, maka dibutuhkan norma sebagai pengatur sistem. Setiap orang sebagai individu di dalam sistem sosial menganut dan mematuhi makna-makna yang sama dari situasi-situasi tertentu yang bermuatan-norma-norma sosial sehingga terjalin perilaku dalam suatu struktur sosialnya. Sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (sosial kontrol). *Sosialisasi* yang maksudnya adalah suatu proses di mana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat (norma) suatu kelompok yang ada dalam sistem sosial, sehingga lambat laun yang bersangkutan akan merasa menjadi bagian dari kelompok bersangkutan. Sedangkan *pengawasan sosial* menurut Soekanto (1985 : 113) adalah, "proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi norma dan nilai". Pengertian tersebut dipertegas menjadi suatu pengendalian atau pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari beberapa komponen, di dalam akan membentuk diferensiasi yang merupakan suatu proses di mana orang perorangan di dalam masyarakat memperoleh hak-hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang lain atas dasar usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Diferensiasi tersebut menghasilkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Diferensiasi sosial akan semakin kompleks akibat adanya pengaruh faktor-faktor yang datang dari luar (eksternal) sehingga terjadi disfungsi dan ketegangan-ketegangan di dalam sistem sosial yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Pandangan ini sebenarnya mengabaikan fakta-fakta sebagaimana Berghe (dalam Nasikun, 1991 : 15) kemukakan sebagai berikut,

- 1) Setiap struktur sosial, di dalam dirinya sendiri, selalu mengandung konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal, yang pada gilirannya justru menjadi sumber bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial;
- 2) Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar (extra systemic change) tidak selalu bersifat adjustive (penyesuaian);
- 3) Suatu sistem sosial, di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik-konflik sosial yang bersifat 'vicious circle' (berulang-ulang);
- 4) Perubahan-perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian yang lunak, tetapi juga terjadi secara revolusioner.

Memahami proses perubahan sosial lewat pendekatan konflik (conflik approach); pendekatan ini bertumpu pada beberapa anggapan dasar seperti yang dikemukakan oleh Dahrendorf (1986 :197-198) sebagai berikut,

- 1) setiap masyarakat – dalam setiap hal – tunduk kepada proses perubahan; perubahan sosial terdapat di mana-mana;
- 2) setiap masyarakat – dalam setiap hal – memperlihatkan pertikaian dan

- pertentangan; pertentangan sosial terdapat di mana-mana;
- 3) setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya;
 - 4) setiap masyarakat didasarkan atas penggunaan kekuasaan oleh sejumlah anggotanya terhadap anggotanya yang lain.

Perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai suatu hal yang wajar dan senantiasa akan terus terjadi karena, perubahan sosial merupakan fenomena integral di dalam setiap masyarakat; demikian juga gejala atau konflik-konflik merupakan gejala yang integral di dalam setiap kelompok masyarakat; setiap komponen masyarakat berkontribusi terhadap proses desintegrasi dan perubahan masyarakat yang bersangkutan; penguasaan dan dominasi dari sekelompok orang terhadap kelompok-kelompok lainnya menghasilkan suatu masyarakat yang terintegrasi. Selanjutnya penganut pendekatan konflik beranggapan bahwa konflik tidak selamanya merugikan, bahkan dapat melahirkan integrasi yang kuat, seperti yang dikemukakan oleh Johnson (1990 : 195-196) yaitu, "... bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang dasar, dan bahwa proses konflik dihubungkan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerjasama, dalam pelbagai cara yang tak terhitung jumlahnya dan bersifat kompleks". Selanjutnya Coser (dalam Poloma, 1984 : 108 – 109) mengemukakan bahwa konflik dengan pihak luar (*out-group*) akan memperkuat integrasi ke dalam (*in-group*), seperti berikut ini,

Seluruh fungsi positif konflik itu (keuntungan dari situasi konflik memperkuat struktur) dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan *out-group*. ... konflik yang sedang berlangsung dengan *out-groups* dapat memperkuat identitas para anggota kelompok.

Adanya musuh bersama yang dari luar akan memperkuat integrasi kelompok ke dalam, seperti halnya konflik yang terjadi antara Palestina Arab sebagai *in-group* dengan Israel sebagai *out-group* akan membawa solidaritas di antara para pendukung konflik tersebut.

Konflik dapat diredakan dengan adanya *katup penyelamat (safety valve)* yang maksudnya ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Penggunaan istilah katup penyelamat artinya saluran luapan konflik bagi mereka yang bermusuhan agar tidak terjadi suatu kehancuran struktur konflik, sehingga katup penyelamat konflik membantu membersihkan suasana kelompok yang sedang kacau atau semakin tajamnya konflik. Katup penyelamat sebagai jalan keluar meredakan permusuhan dalam kehidupan sehari-hari seperti, DPR berfungsi menerima aspirasi rakyat apabila terjadi ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan pemerintahan. Badan Penasehat Perkawinan memberi masukan bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik agar tidak terjadi disfungsi (perceraian). LBH membantu mereka yang mengalami konflik misalnya dengan norma hukum. Katup penyelamat sebagai saluran bagi luapan konflik yang berlebihann dengan jalan menerima setiap gejala ketidakpuasan, kekecewaan, atau pengaduan karena dirugikan pihak lain. Dalam hal ini Coser (dalam Poloma, 1984 :110-111) menyebutkan,

Lewat katup penyelamat (safety valve) isu permusuhan dihambat agar tidak berpaling melawan obyek aslinya. Tetapi penggantian yang demikian mencakup juga biaya bagi sistem sosial maupun bagi individu: mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem untuk memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah, maupun membendung ketegangan dalam diri-individu, menciptakan kemungkinan tumbuhnya ledakan-ledakan desktruktif.

Banyak kasus dalam kehidupan, merugikan kedua belah pihak seperti pengrusakan pabrik oleh karyawan yang tidak puas, hal ini terjadi disebabkan tidak berfungsinya katup penyelamat, sehingga luapan emosi tidak terkendali, akibatnya struktur perusahaan hancur dan karyawan banyak yang di PHK.

Di setiap kelompok masyarakat pada dasarnya mempunyai akar kepentingan yang selalu tidak sama di antara para anggotanya. Karena itu, setiap kelompok masyarakat senantiasa di dalam situasi *konflik*, hal ini dapat timbul karena distribusi kesempatan dan otoritas yang terbatas dan tidak merata. Para penganut *pendekatan* atau *teori konflik*, yakin bahwa konflik adalah gejala yang menjadi bagian integral dalam kehidupan setiap masyarakat. Karena itu, yang dilakukan orang hanya sebatas mengendalikan konflik agar tidak sampai menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan, disintegrasi atau disorganisasi yang berarti. Dengan demikian, Konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat perlu adanya suatu pengendalian, agar konflik yang terjadi menjadi bersifat menghancurkan atau merusak struktur masyarakat itu sendiri.

Sebelum terjadinya konflik di masyarakat perlu adanya pengawasan/pengendalian sosial yang bersifat konformitas (*conformity*) yang artinya proses penyesuaian diri dengan masyarakat, dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah (norma) dan nilai-nilai masyarakat. Melalui konformitas ini warga masyarakat harus menyesuaikan diri dan diajak untuk menjalankan norma dan menghormati nilai yang berlaku. Lain halnya apabila konflik telah terjadi dan konflik tersebut bersifat negatif atau merugikan kehidupan, sehingga diperlukan beberapa pengendalian. Cara pengendalian sosial dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan yang terjadi di masyarakat, menurut Koentjaraningrat (1974 : 207-208) digolongkan paling sedikit, ialah,

- a) mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat;
- b) memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasanya taat kepada adat istiadat;
- c) mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat;
- d) mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat dengan ancaman dan kekerasan.

Cara pengendalian seperti yang dikemukakan tersebut merupakan usaha untuk menegakkan adat istiadat atau norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi cara-cara pengendalian tersebut dirinci kembali dengan tujuan pengendalian sosial yang sama

yaitu mengembalikan masyarakat kepada keadaan semula sesuai dengan keinginan dari yang memiliki wewenang atau kekuasaan.

Cara pengendalian konflik yang *pertama* yaitu dengan *konsiliasi (conciliation)*, yakni lewat lembaga-lembaga sebagai wadah untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan di antara pihak-pihak yang bertentangan. cara seperti ini lumrah terjadi di kalangan yang bergelut dalam dunia politik ataupun dalam bentuk pertemuan di antara beberapa pemuka masyarakat; mereka berkumpul dan berdiskusi serta berdialog tentang perbedaan-perbedaan di antara mereka, terutama dalam hal memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, seperti adanya pemindahan pedagang kakilima, maka beberapa tokoh pedagang akan berkumpul untuk memecahkan masalah tersebut, atau pemuka masyarakat beserta warga bersama-sama dengan pihak yang berwenang berusaha mengatasi dan menyelesaikan terjadinya perkelahian antar kampung, kemudian mereka membentuk suatu lembaga atau pranata sosial yang berwenang mengatasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hal itu. Adapun lembaga-lembaga yang mewadahnya berupa badan-badan yang bersifat mewakili warga masyarakat; lembaga-lembaga tersebut mesti memenuhi empat hal seperti Nasikun (1991 : 24-25) berikut ini,

- 1) Lembaga tersebut harus merupakan lembaga-lembaga yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya;
- 2) Kedudukan lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat bersangkutan harus bersifat monopolistik, dalam arti hanya lembaga-lembaga itulah yang berfungsi demikian;
- 3) Peranan lembaga-lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain merasa terikat kepada lembaga-lembaga tersebut, sementara keputusan-keputusannya mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan para anggotanya;
- 4) Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis, dalam mana setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat-pendapatnya sebelum keputusan-keputusan tertentu diambil.

Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga tadi, kelompok-kelompok yang bertentangan itu mesti memenuhi tiga macam prasyarat sebagai berikut,

- 1) Setiap kelompok harus menyadari terlebih dahulu, bahwa di antara mereka ada situasi konflik. Karena itu, setiap kelompok harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan serta kejujuran;
- 2) Berbagai kekuatan sosial dari masing-masing yang bertentangan harus terorganisasikan dengan jelas, sehingga konflik bisa mudah dikendalikan; dan
- 3) Setiap kelompok yang terlibat konflik mesti mematuhi aturan-aturan permainan sehingga terjadi hubungan sosial yang dapat mengurangi ketidakadilan dan munculnya pihak ketiga yang merugikan kepentingan mereka sendiri.

Cara *kedua* adalah *mediasi*, di mana kedua belah pihak yang bersengketa sepakat menunjuk pihak ketiga untuk memberikan pandangan dan nasihat mengenai penyelesaian sengketa mereka secara baik. Cara ini lebih menumbuhkan rasionalisme dan mengurangi ekspresi-ekspresi emosional dari kedua belah pihak.

Cara *ketiga* adalah lewat *perwasitan*, atau *arbitrasi*; dalam hal ini kedua belah pihak terpaksa menerima keputusan-keputusan dari pihak ketiga.

Terdapat pula berbagai cara pengendalian (kontrol atau pengawasan) sosial, seperti berikut ini,

- 1) *Preventif* dan *Represif*. Preventif adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik atau usaha untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, cara seperti ini dilakukan tanpa kekerasan melalui pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti pengarahan, pembinaan, atau bimbingan terhadap masyarakat. Sedangkan pengendalian dengan cara represif ialah usaha dari pihak yang memiliki wewenang untuk mengembalikan kepada kondisi atau keadaan semula sebelum terjadinya suatu gangguan di masyarakat, usaha pengendalian seperti ini dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pada pelaku yang melanggar norma masyarakat.
- 2) *Persuasif*, yaitu pengendalian sosial dengan cara ajakan agar pihak lain bersedia untuk mengikuti ajakan tersebut, sehingga keadaan yang tidak diinginkan dapat dihentikan.
- 3) *Coercive*, yaitu pengendalian sosial dengan menggunakan tekanan atau kekuatan fisik, pengendalian seperti ini dilakukan secara paksaan.
- 4) *Compulsion*, yaitu suatu pengendalian dilakukan pada suatu keadaan di mana individu atau kelompok merasa dipaksa oleh oleh faktor-faktor eksternal (dari yang memiliki kekuasaan/wewenang) untuk melakukan hal-hal yang tidak disetujuinya.

Cara-cara pengendalian konflik tersebut merupakan usaha untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan di masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang tenang, teratur, dan stabil tanpa adanya hal-hal yang dapat menggoyahkan masyarakat itu sendiri.

1.3 Masyarakat Sebagai Kesatuan Sosial

Memahami kehidupan manusia, tidak lepas dari kehidupan masyarakat, karena di dalamnya terdapat berbagai macam usaha yang dilakukan baik oleh individu maupun bersama-sama dengan individu-individu lainnya. Begitupula di dalam kehidupan bermasyarakat akan dijumpai usaha untuk mempersatukannya atau adanya pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi yang penting adalah kehidupan dan dinamika masyarakat itu sendiri sebagai sistem sosial. Masyarakat dalam istilah Inggrisnya adalah *society*, sedangkan kata masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, *syakara*, yang berarti ikut serta atau partisipasi, kata Arab *masyarakat* berarti *saling bergaul*, yang istilah ilmiahnya *berinteraksi*.

Pengertian masyarakat itu sendiri menurut beberapa ahli, antara lain :

- 1) Menurut Hassan Shadilly (1983 : 47) adalah “golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara

golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain”.

- 2) Menurut Koentjaraningrat (1980 : 160) adalah “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas yang sama”.
- 3) Menurut Ralph Linton (1984 : 118) adalah “setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas”.
- 4) Menurut Bertrand (1980 : 27) adalah sekelompok orang yang sama identitasnya, teratur sedemikian rupa di dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi hidup bersama secara harmonis.
- 5) Menurut Soekanto (1985 : 466) adalah “suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan”.
- 6) Menurut Horton dan Hunt (1991 : 407) adalah “kelompok manusia yang secara nisbi mampu menghidupi kelompoknya sendiri, bersifat independen dan mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan, serta kebanyakan kegiatannya berlangsung di dalam kelompok itu sendiri”.

Definisi-definisi tersebut menampilkan ciri-ciri masyarakat sebagai berikut,

- 1) manusia yang hidup bersama, dua atau lebih;
- 2) bergaul dalam jangka waktu relatif lama;
- 3) setiap anggotanya menyadari sebagai satu kesatuan; dan
- 4) bersama membangun sebuah kebudayaan yang membuat keterlaturan dalam kehidupan bersama.

Di dalam masyarakat senantiasa terjadi interaksi, dan faktor-faktor dasar terjadinya proses interaksi sosial tersebut adalah faktor *imitasi* (meniru), *sugesti* (menerima), *identifikasi* (menempatkan diri), dan *simpati* (turut merasakan). Sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial (social contact) dan komunikasi (social-communication). Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial antara lain, kerjasama (cooperation); kompetisi (competition); pertentangan (conflict), dan akomodasi (accomodation). Bentuk kontak sosial adalah orang-perorangan; orang-perorangan dengan kelompok; dan kelompok dengan kelompok.

Memahami apa sebenarnya masyarakat itu ? apa fungsi masyarakat atau apa perlunya manusia hidup bermasyarakat ? dari kajian topik seperti itu, tentu akan terefleksikan nilai-nilai yang diharapkan membangun sikap-sikap dan perilaku-perilaku individu yang sempat memahami apa itu masyarakat ?

- 1) Akan membangun rasa senasib sepenanggungan di antara sesama manusia; khusus bagi manusia Indonesia akan terwujud rasa kesatuan sebagai satu bangsa dan masyarakat, yaitu Indonesia;
- 2) Agar diantara sesama tertanam rasa toleransi; seorang individu hanya mempunyai arti atau makna manakala ia menjadi bagian integral dalam kelompok atau masyarakat;
- 3) Agar timbul kesadaran bahwa diantara sesama ada saling ketergantungan (interdependensi) bilamana berkehendak tetap survival dalam usaha meraih

kehidupan yang lebih baik; akan sulit diterima bila seseorang hidup layak dengan cara mengisolir diri dari sesamanya;

- 4) Salah satu ukuran dari keberartian seseorang adalah keterartian orang tersebut bagi kebahagiaan sesamanya; dan
- 5) Nilai demokrasi bisa tumbuh dari sikap saling menghargai perasaan dan pendapat diantara sesama.

Memahami masyarakat yang lebih mendalam, alangkah baiknya dimulai dengan memahami masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok kesatuan hidup terlebih dahulu, karena melalui hal tersebut akan diketahui setiap gejolak dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Menelaah masyarakat dapat dilakukan dari dua segi yaitu dari segi struktural dan segi dinamikanya. Segi struktural atau struktur sosial yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok berupa kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Sedangkan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial.

Masyarakat sebagai suatu lembaga sosial bersifat langgeng, karena setiap anggotanya (individu) berusaha untuk bersatu dan menyesuaikan diri dengan cara berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu yang lama, selama mereka masih mendiami wilayah yang sama. Masyarakat yang paling mudah untuk diamati adalah kesatuan hidup masyarakat setempat yang disebut **community**. Misalnya desa yang didiami oleh petani, desa nelayan, perkampungan pemetik teh, dan lain-lain. Mereka semuanya sebagai komunitas yang dapat diketahui karena berada pada wilayah tertentu dan memiliki batas-batas yang jelas serta interaksi yang menonjol dilakukan dengan sesama anggota komunitas.

Suatu komunitas tidak begitu saja muncul, tetapi memiliki syarat-syarat tertentu menurut **Soekanto** (1984 : 29) antara lain :

- 1) Adanya beberapa rumah atau rumahtangga yang terkonsentrasikan di suatu wilayah geografis tertentu;
- 2) Warga-warganya mempunyai taraf interaksi yang terintegrasikan; dan
- 3) Adanya rasa kebersamaan, yang tidak perlu didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan.

Adanya beberapa rumah atau rumahtangga rasa kebersamaan yang relatif luas. Dengan demikian, bahwa masyarakat tersebut memiliki solidaritas ke dalam cukup tinggi sebagai suatu integrasi yang dapat dijadikan identitas sosial, sehingga berbeda dengan komunitas atau kelompok sosial yang lain.

Ikatan sosial yang dimiliki oleh setiap kesatuan merupakan suatu lingkungan yang terbatas dengan wilayah yang jelas, sehingga interaksi sosial yang berlangsung diantara memiliki frekuensi yang tinggi dengan hidup masyarakat setempat (komunitas) berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sama karena ikatan tersebut merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan setiap warga atau anggotanya ke dalam suatu kelompok sosial di mana mereka tinggal. Perbedaan ikatan sosial pada kesatuan hidup masyarakat setempat menurut Soekanto (1984 : 30), yaitu :

- 1) *Residence community* atau *ecological community* di mana faktor pengikat yang terpenting bagi anggotanya (warga masyarakat) adalah wilayah tempat tinggal tertentu. Maka ikatan tempat tinggal tersebut didasarkan pada hubungan sosial; dan
- 2) *Moral community* atau *psychic community* di mana ikatan antar para anggotanya (warga masyarakat) di dasarkan pada faktor spiritual yang mencakup nilai asal-usul atau kepercayaan.

Kedua ikatan tersebut pada dasarnya memiliki motivasi yang sama untuk aktif dalam kesatuan masyarakat (integrasi). Dengan demikian, masyarakat sebagai kelompok-kelompok sosial memiliki 3 macam ciri, menurut Faisal (1980 : 27) sebagai berikut :

- 1) Pada masyarakat mesti terdapat sekumpulan individu yang jumlahnya cukup besar;
- 2) Individu-individu tersebut harus mempunyai hubungan yang melahirkan kerjasama di antara mereka, minimal satu tingkatan interaksi; dan
- 3) Hubungan individu-individu itu sedikit banyak sifatnya harus permanen.

Ciri masyarakat jelas sekali terdiri dari sejumlah individu yang jumlahnya banyak, terdapat kerjasama, dan berinteraksi secara langgeng. Misalnya, rapat anggota koperasi tidak dapat disebut masyarakat karena jumlahnya terbatas.

Komunitas merupakan bagian dari masyarakat luas atau kelompok masyarakat yang secara khusus dari suatu sistem sosial. Pengertian formal dari komunitas menurut Bertrand (1974 : 149-150) sebagai berikut : (1) *komunitas* adalah suatu sistem sosial yang meliputi sejumlah struktur sosial yang tidak terlembagakan dalam bentuk kelompok atau organisasi dalam pemenuhan kebutuhannya melalui hubungan kerjasama struktural; (2) *komunitas* adalah unit struktur sosial yang terkecil dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri; dan (3) *Komunitas* dapat berdiri sendiri dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang lebih besar.

Mengapa komunitas dapat berdiri sendiri ? sedangkan pemenuhan kebutuhan komunitas banyak yang didatangkan dari luar ? Karena itu komunitas memerlukan hubungan yang dijalin dengan baik dengan lingkungan luar tanpa merusak sistem sosial mereka sendiri. Maka kehidupan yang lebih luas dari komunitas yaitu masyarakat secara umum. Pengertian masyarakat yaitu "kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok, berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama".

Setiap warga masyarakat menginginkan kehidupan yang teratur dan aman. Hal ini dapat terjadi apabila warganya melakukan pengorbanan dari sebagian kemerdekaan yang dimilikinya baik secara paksaan maupun sukarela. Pengorbanan yang dilakukan warga masyarakat salah satunya melalui menahan nafsu atau sewenang-wenang pribadi yang dapat mengganggu warga masyarakat lain, sehingga tercipta keamanan dan kepentingan bersama. Pengorbanan secara paksaan artinya bahwa setiap warga masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum

yang ditetapkan (oleh negara, perkumpulan, atau lembaga-lembaga sosial yang ada). Pengorbanan secara sukarela artinya tunduk kepada adat atas dasar kesadaran dan persaudaran dalam kebersamaan.

Masyarakat yang merupakan kumpulan individu, di dalamnya akan membentuk suatu organisasi dan sistem sosial, yang sangat dipengaruhi oleh tujuan-tujuan yang terdapat di dalamnya. Adapun organisasi sosial menurut Bertrand (1974 : 3) yaitu suatu jaringan (kerja) yang tersusun dari interaksi sosial. Setiap organisasi tentu saja akan berhubungan dengan pola-pola interaksi yang dapat dijumpai di setiap kelompok masyarakat yang beranekaragam, seperti keluarga, perusahaan, atau masyarakat secara keseluruhan. Sehingga salah satu ciri di dalam suatu organisasi akan terjadi interaksi baik antar individu; antar kelompok; maupun individu dengan kelompok.

Interaksi sosial dalam masyarakat menurut Loomis (dalam Faisal, 1980 : 28) memiliki empat ciri yang penting, yaitu :

- 1) Jumlah pelaku interaksi sosial lebih dari seorang, dapat dilakukan dua orang atau lebih;
- 2) Adanya komunikasi antar pelaku interaksi dengan menggunakan simbol-simbol;
- 3) Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan masa datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung; dan
- 4) Adanya suatu tujuan tertentu.

Masyarakat sebagai organisasi sosial karena di dalamnya terdapat cita-cita dan budaya yang sama, yaitu untuk kesejahteraan dan keamanan yang sama di bawah satu falsafah yang dijunjung bersama. Pengembangan masyarakat untuk mencapai suatu organisasi sosial yang terarah dan teratur diperlukan adanya integrasi.

Integrasi dapat dicapai melalui pola interaksi sosial yang memadai dan terkordinasi antar unsur-unsur pendukung masyarakat, terutama mengenai penanaman norma yang berlaku di masyarakat. Norma akan mengatur pola-pola tingkah laku atau interaksi yang sesuai dan diharapkan oleh masyarakat.

Dalam suatu masyarakat dikenal adanya nilai dan norma, yang memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan sosial, sehingga nilai merupakan pola kelakuan yang diinginkan masyarakat, sedangkan norma merupakan cara kelakuan untuk mencapai nilai tersebut. Nilai bukan merupakan suatu keinginan setiap individu melainkan apa yang diinginkan, ialah apa yang tidak diharapkan tetapi dirasakan pantas atau benar bagi masyarakat (bagi diri kita dan bagi orang lain. Sehingga nilai merupakan ukuran yang mengatasi kemauan pada saat dan situasi yang kebetulan.

Nilai (value) artinya suatu ukuran, patokan, anggapan, keyakinan yang dianut oleh orang banyak (masyarakat) dalam suatu kebudayaan tertentu, sehingga muncul apa yang benar, pantas, luhur dan baik untuk dikerjakan, dilaksanakan, atau diperhatikan.

Nilai berbeda dengan norma, karena norma merupakan cara perbuatan dan kelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Setiap warga masyarakat wajib untuk mengikuti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai maka akan mendapat tanggapan dari

warga masyarakat lainnya, bahkan akan diberi sanksi tertentu oleh masyarakat atau yang berwenang dalam menegakkan nilai dan norma.

Norma yang berlaku di masyarakat sifatnya sangat bermacam-macam, sehingga untuk memahaminya Polak (1985 : 31-32) membagi menjadi empat macam sifat, yaitu :

- 1) Norma yang diikuti tanpa berfikir, karena berdasarkan tradisi atau kebiasaan (**folksway**). Kelakuan sosial selalu diikuti dengan contoh dan kebiasaan tanpa melalui suatu proses berfikir, melainkan dianggap baik, patut, layak, sopan-santun, tata krama dan lain-lain. Kelakuan semacam itu dinamakan folksway atau kelaziman (kebiasaan). Folksway mempengaruhi setiap tindakan manusia seperti cara makan, minum, batuk, berjalan, berpakaian, tertawa, senyum, berbicara, dan lain-lain, semuanya mengikuti cara-cara yang lazim dan seharusnya dilakukan;
- 2) Norma yang diikuti tidak hanya otomatis dan tanpa berfikir, tetapi karena dihubungkan dengan sesuatu keyakinan dan perasaan, yaitu sesuatu nilai penting yang dimiliki oleh individu dan masyarakat, yang disebut dengan **mores** atau aturan kesusilaan. Mores bersandar pada nilai kebudayaan, yaitu ukuran umum dan azasi, sering abstrak tentang apa yang baik dan seharusnya dilakukan. Mores memuat cara-cara kelakuan yang berhubungan dengan penghormatan pada orangtua, atau orang yang umurnya lebih tua. Mores dapat juga sebagai aturan kesusilaan dalam cara berpakaian yang baik untuk menutup badan (aurat) atau yang seharusnya dipakai pada saat-saat tertentu sesuai dengan situasi, seperti pakaian berkabung, pakaian untuk kuliah, pakaian ke pesta dan lain-lain;
- 3) Di samping segala norma-norma yang tidak tertulis dan resmi (informal) serta spontan, terdapat juga norma yang disengaja dan ditetapkan secara formal, misalnya peraturan-peraturan hukum. **Hukum** merupakan suatu kontrol sosial terhadap perilaku masyarakat secara umum dan memiliki sanksi yang tegas, karena hukum merupakan kongkretisasi dari sistem nilai yang berlaku di masyarakat; dan
- 4) Banyak cara berbuat dan bertindak yang didasarkan iseng atau meniru, yang dinamakan **mode** atau **fashion** yang dilakukan dalam pakaian, rambut, cara berjalan, penampilan, bahasa dan lain-lain tetapi sifatnya tidak langgeng (berubah-ubah). Sehingga mode atau fashion ini merupakan cara dan gaya melakukan atau membuat sesuatu yang sering berubah-ubah, serta diikuti orang banyak.

Adanya beberapa sifat dari norma tersebut, merupakan bagian dari kehidupan yang ada di setiap masyarakat, sehingga sebagai suatu pengendali agar sesuai dengan keinginan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Masyarakat sebagai organisasi sosial tentu saja memiliki aturan yang tidak tertulis atau tertulis agar setiap interaksi atau tindakan warganya dapat terarah dan terkendali, sehingga tidak asal jadi, melainkan terdapat keteraturan.

Apabila masyarakat sebagai organisasi sosial tentu akan memiliki beberapa prinsip pokok sebagai landasannya, antara lain harus ada :

- 1) *Prinsip alokasi*. Suatu organisasi dapat berkembang sebagai suatu sistem karena

adanya kerjasama dari dua atau beberapa pelaku dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Tidak ada satupun organisasi yang dapat dibentuk dan berkelanjutan eksistensinya tanpa melalui proses peranan, fasilitas, dan penghargaan di dalamnya.

- 2) *Peranan*. Peranan organisasi harus sesuai dengan kriteria fisik atau keahlian dari organisasi yang bersangkutan sebagai suatu ciri. Dengan demikian, masyarakat sebagai suatu organisasi akan diketahui peranan setiap warganya dalam mendukung pembangunan. Begitu pula halnya peranan setiap warga masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yang terdapat di dalamnya.
- 3) *Fasilitas*. Fasilitas yang terdapat dalam kehidupan menyangkut obyek fisik seperti telepon, bank, kantor polisi, perpustakaan, puskesmas dan lain-lain. Di samping itu terdapat pula orang-orang yang siap melayani masyarakat (jasa) baik diminta ataupun tidak.
- 4) *Penghargaan*. Penghargaan paling sederhana dari setiap warga masyarakat yaitu diakui keberadaannya. Tentu saja dalam ini akan berhubungan pelayanan masyarakat, di mana mereka tidak disepelekan, melainkan mendapat pelayanan yang sejajar disetiap warganya, sehingga merasa mendapat pelayanan yang memuaskan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, penghargaan demikian akan berhubungan dengan harga dirinya sebagai warga masyarakat.

Ke empat macam prinsip tersebut merupakan syarat minimal dalam kehidupan apabila integrasi ingin ditegakkan.

Dalam rangka mewujudkan suatu integrasi di masyarakat, maka terlebih dahulu mengenal sistem sosial sebagai suatu pendukung terlaksananya kehidupan setiap individu dalam masyarakat. Kehidupan di masyarakat akan terdapat pola-pola interaksi yang langgeng, sehingga Parsons (1951 : 25) mengemukakan bahwa sistem sosial merupakan sistem proses-proses interaksi di antara para pelaku, sedangkan struktur sistem sosial adalah struktur hubungan-hubungan di antara para pelaku yang terlibat dalam proses interaksi.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial di dalamnya terdapat beberapa warga yang saling berhubungan dan saling ketergantungan, sehingga dalam suatu sistem menurut Faisal (1980 : 29) paling sedikit harus terdapat (1) dua orang atau lebih; (2) terjadi interaksi di antara mereka; (3) memiliki tujuan; dan (4) memiliki struktur, simbol dan harapan-harapan bersama sebagai pedoman.

Struktur sosial sering digunakan untuk menggambarkan keteraturan sosial, untuk menunjuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk cara yang sama, sehingga struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. Sedangkan interaksi dalam sistem sosial dikonsepsikan secara rinci dengan menjabarkan manusia yang menempati posisi-posisi dan melaksanakan peranannya. Hendropuspito (1989 : 89) mengemukakan bahwa *struktur sosial* ialah "skema penempatan nilai-nilai sosio-budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dan demi kepentingan masing-masing bagian untuk jangka waktu yang relatif lama".

Dalam hal ini Parsons mengemukakan bahwa sistem sosial merupakan

konsep yang lebih luas daripada struktur sosial, karena menyangkup aspek fungsional dari sistem, menyangkut konsekuensi-konsekuensi positif dan negatif dari sub kebudayaan terhadap keseluruhan sistem, dan sebagai tambahan bagi aspek strukturalnya sendiri. Dengan demikian, Parsons (1951 : 153 - 167) mengemukakan struktur yang terdapat dalam masyarakat, yaitu :

- 1) *Struktur kekerabatan*. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan ungkapan perasaan seksual, pemeliharaan dan pendidikan anak. Keluarga merupakan pengelompokan masyarakat yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, sehingga di dalamnya memiliki peran sebagai : (a) di setiap masyarakat mengenal bahwa keluarga merupakan awal bagi anak yang baru lahir untuk memperoleh statusnya; (b) proses sosialisasi bagi anak akan selalu terjadi pada setiap keluarga, dan anak akan di sosialisasikan dengan warga beserta masyarakat yang lain; (c) kehidupan keluarga akan mengatur hubungan suami istri secara normal dan berkesinambungan; dan (c) keluarga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.
- 2) *Struktur prestasi instrumental dan stratifikasi*. Struktur ini menyalurkan semangat yang mendorong individu dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Strategi yang paling penting untuk menjamin motivasi warga masyarakat, tidak lain dengan jalan memberikan penghargaan sesuai dengan sumbangannya. Misalnya, kewajibannya atau jerih payah yang dilaksanakan individu akan mendapat imbalan yang sesuai, sehingga seseorang yang mendapat gaji dari tempat bekerjanya maka akan disesuaikan dengan status di mana ia melaksanakan kewajiban bekerja. Adanya perbedaan status dalam tempat kerja menyebabkan adanya perbedaan dalam menerima gaji dan mendapatkan fasilitas.
- 3) *Teritorial, paksaan (kekuatan) dan pengintegrasian kekuasaan*. Semua masyarakat akan memiliki organisasi teritorial, yaitu tempat atau lokasi di mana masyarakat tersebut berada. Paksaan (kekuatan) yang terdapat dalam masyarakat merupakan usaha untuk pencegahan dari tindakan-tindakan warganya yang tidak diinginkan, yaitu memaksa setiap warga agar tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam integrasi kekuasaan nampaknya berhubungan dengan lancarnya organisasi sosial (masyarakat) dalam melaksanakan fungsinya, sehingga melalui kekuasaan dalam organisasi maka akan selalu mengawasi setiap konflik yang terjadi di masyarakat dengan mengembalikannya kepada situasi yang dianggap stabil.
- 4) *Religi dan integrasi nilai*. Nilai yang berlaku di masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu masyarakat yang teratur dan stabil. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat umumnya memiliki hubungan yang erat dengan lembaga-lembaga keagamaan (sistem kepercayaan) yang dianut warga masyarakat. Sehingga setiap nilai dan keyakinan warga masyarakat terbentuk oleh warisan agama. Dengan demikian, agama atau kepercayaan yang terdapat di masyarakat senantiasa memberikan pegangan hidup yang paling mendasar dan bersifat mutlak.

Struktur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tersebut merupakan suatu hal yang mendasar dan umumnya berlaku di masyarakat.

Pemahaman mengenai prinsip struktur sosial dikemukakan oleh Firth (1966 : 106-137) sebagai berikut : Perhubungan-perhubungan yang timbul dari hidup bermasyarakat ini dapat kita lihat sebagai suatu rencana atau suatu sistim yang dapat kita namakan *struktur sosial*. Cara bagaimana sebenarnya perhubungan-perhubungan itu bekerja, mengatur hidup orang seorang dan sifat masyarakat, dapat kita namakan *fungsi sosial*. Struktur dan fungsi sosial keduanya tidak dapat dipisahkan, sehingga satu sama lain sangat erat hubungannya dalam memahami masyarakat. Struktur sosial suatu masyarakat meliputi berbagai macam tipe kelompok yang muncul oleh banyaknya individu yang terdapat di dalam kelompok tersebut, pengelompokan ini termasuk lembaga atau pranata-pranata sosial di masyarakat. Di dalam setiap lembaga sosial akan muncul hubungan-hubungan (interaksi) sebagai hasil kegiatan kelompok yang bergerak untuk mencapai tujuan bersama.

Landasan struktur sosial di masyarakat secara sederhana dapat diuraikan berupa jenis kelamin, usia, daerah dan kekeluargaan, sehingga setiap kegiatan masyarakat umumnya terdapat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, di mana laki-laki biasanya bekerja dengan menggunakan kekuatannya, sedangkan wanita bekerja dengan menggunakan rasa dan ketelitiannya. Pembagian kerja ini tentu saja tidak mutlak, karena adapula yang saling tumpang tindih di mana pekerjaan yang dilakukan laki-laki ada yang dikerjakan oleh wanita, begitu juga sebaliknya. Di samping itu banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau oleh wanita. Laki-laki secara fisik dan psikologis memang berbeda dengan perempuan, sehingga cara berjalan dan berpakaianpun masing-masing akan berbeda. Dalam hal pembagian tugas keluarga, laki-laki akan bertindak sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, sedangkan wanita akan mengurus rumah dan mendidik anak. Pembagian tugas dan kewajiban di masyarakat dapat lebih kompleks lagi, sedangkan yang di uraikan di atas merupakan suatu gambaran struktur sosial atas dasar jenis kelamin, belum lagi struktur sosial atas dasar yang lainnya.

Dengan demikian, masyarakat untuk dapat disebut sebagai suatu sistem sosial, maka suatu bentuk pergaulan hidup harus memenuhi beberapa unsur-unsur, menurut Soekanto (1982 : 95 - 96) sebagai berikut :

- 1) *Kepercayaan* yang merupakan pemahaman terhadap segala aspek alam semesta yang dianggap sebagai suatu kebenaran;
- 2) *Perasaan*, yakni keadaan kejiwaan manusia yang menyangkut alam sekelilingnya, maupun rekan-rekannya sesama manusia;
- 3) *Tujuan*, yang merupakan suatu cita-cita yang harus dicapai melalui perubahan atau denan jalan mempertahankan sesuatu (statusquo);
- 4) *Kaedah*, yakni pedoman-pedoman tentang perikelakuan yang diharapkan atau yang pantas;
- 5) *Kedudukan dan peranan* yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta penerapannya di dalam proses interaksi sosial;
- 6) *Pengawasan*, yakni kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain, agar berbuat

sesuai dengan pemegang kekuasaan;

- 7) *Jenjang* dalam masyarakat yang menyangkut posisi sosial seseorang, yang menentukan alokasi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya;
- 8) *Sanksi*, yakni persetujuan atau penolakan terhadap perikelakuan tertentu yang imbalannya adalah hukuman atau hadiah (imbalan);
- 9) *Fasilitas*, yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan;
- 10) *Kelestarian dan kelangsungan hidup*; dan
- 11) *Kesesuaian* antara kualitas hidup dengan kualitas lingkungan.

Kerangka tersebut di atas, sekaligus menunjukkan struktur dan proses sistem sosial, dan merupakan suatu patokan untuk mempelajari bentuk-bentuk pergaulan hidup.

Selanjutnya Soekanto (1982 : 99 - 100) mengemukakan secara fungsional, maka setiap sistem sosial akan dapat dianalisa sebagai sistem gerak sosial, dengan mempergunakan patokan-patokan fungsional dari Parsons sebagai berikut :

- 1) *Fungsi mempertahankan pola*, termasuk ke dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem budaya sebagai sub-sistem gerak sosial. Suatu sub-sistem budaya memberikan jawaban terhadap masalah-masalah mengenai faktor dasar kehidupan manusia, yang pada hakekatnya berkisar pada falsafah hidupnya. Falsafah hidup kemudian terwujud di dalam sistem nilai-nilai.
- 2) *Fungsi Integrasi*, mencakup faktor-faktor yang diperlukan untuk mencapai keadaan serasi, atau hubungan serasi antara bagian-bagian suatu sistem sosial (agar supaya bagian-bagian tadi berfungsi sebagai suatu keseluruhan atau kesatuan). Hal ini mencakup identitas masyarakat, keanggotaan seseorang dalam masyarakat, dan susunan normatif dari bagian-bagian tersebut.
- 3) *Fungsi untuk mencapai tujuan*, termasuk ke dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan kepribadian warga-warga masyarakat tersebut, atas dasar faktor-faktor sebagai berikut :
 - a) Masyarakat perlu mengembangkan suatu sistem yang akan dapat mendorong warga-warganya, agar menunjukkan nilai-nilai dan kaedah-kaedah. hal ini akan terwujud dalam proses sosialisasi dan sistem pengendalian sosial; dan
 - b) Masyarakat perlu mengorganisasikan warga-warganya untuk mencapai tujuan, yang biasanya dianggap sebagai aspek politik dari masyarakat tersebut
- 4) *Fungsi Adaptasi*, termasuk di dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dengan organisme, perikelakuan warga-warganya. hal ini mencakup pengarahan dan penyesuaian antara kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, dengan keadaan sekelilingnya yang mencakup ekonomi dan teknologi.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial merupakan suatu keseluruhan dari kehidupan bernegara, karena masyarakat memerlukan suatu keteraturan dalam menjalin hubungan-hubungan sosial di antara mereka, dan satu sama lain dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan tiap kelompok masyarakat, yang kemudian menjadi

Masyarakat merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat sistem yang

terdiri dari berbagai komponen yang satu sama lain memiliki fungsi dan saling melengkapi, begitu pula, masyarakat sebagai kelompok sosial yang besar di dalamnya terdapat beberapa kelompok sosial yang lebih kecil, di dalam kelompok tersebut memiliki interaksi, solidaritas, pemimpin, nilai maupun norma tersendiri yang mengikat anggotanya. Dengan demikian, kelompok ini sebagai suatu organisasi sosial yang merupakan bagian dari masyarakat sendiri yang di dalamnya terdapat ikatan-ikatan sosial terhadap anggotanya. Menurut Horton dan Hunt (1991 : 214-215) mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian kelompok sosial, antara lain :

- 1) *Kumpulan manusia secara fisik*, misalnya orang yang sedang menunggu angkutan umum, mereka ini tidak terikat oleh sesuatu, kecuali memiliki tujuan yang sama yaitu menunggu dan secara fisik jaraknya berdekatan atau kelompok ini disebut juga kerumunan;
- 2) *Sejumlah orang yang memiliki kesamaan ciri-ciri tertentu*, hal ini disebut juga kategori, misalnya kaum pria, para manula, para pekerja kasar atau buruh bangunan, dan lain-lain;
- 3) *Sejumlah orang yang memiliki pola interaksi yang terorganisasi dan terjadi secara berulang-ulang*, yang termasuk kelompok dalam hal ini seperti keluarga, kelompok persahabatan, kelompok musik dan lain-lain;
- 4) *Kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi*. Dengan demikian kelompok sosial ini sudah ada kesadaran setiap anggotanya untuk bergabung dalam suatu wadah dan saling berinteraksi.

Suatu kelompok sosial pada hakikatnya merupakan suatu kemajemukan individu yang terlibat di dalamnya, satu sama lain saling berhubungan secara berkesinambungan, saling memperhatikan, dan sadar akan adanya suatu manfaat bersama. Ciri yang sangat mendasar dari kelompok sosial ini, yaitu setiap anggotanya mempunyai sesuatu yang dianggap milik bersama

Terbentuknya kelompok sosial diawali dengan adanya interaksi sosial. Sehingga interaksi sosial sebagai awal dari terbentuknya kelompok sosial terkecil (kelompok dua orang) hingga masyarakat sebagai kelompok yang besar, hal ini dikemukakan oleh Georg Simmel (dalam Soekanto, 1986) seorang ahli sosiologi dari Jerman. Mengemukakan bahwa masyarakat sebagai kumpulan individu yang membentuknya serta pola perilaku yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, kelompok masyarakat tidak dapat terlepas dari beberapa individu yang terdapat di dalamnya, karena terdapat *pola-pola interaksi timbal balik* antar individu, sehingga interaksi merupakan suatu proses dinamis yang terus berlangsung selama antar individu tersebut memberi dukungan aktif. Proses terjadinya kelompok atau masyarakat disebutnya sebagai *Sosiasi* dalam bahasa Jerman disebut *Vergesellschaftung*, bahwa suatu masyarakat itu ada karena terdapat sejumlah individu yang terjalin secara kompleks melalui interaksi dan saling mempengaruhi.

Terdapat dua konsep interaksi yang terdapat di dalam kelompok atau masyarakat, yaitu *bentuk* dan *isi*. Dilihat dari situasi sosial, bahwa *isi* terdiri dari : Naluri untuk memiliki keturunan, kepentingan obyektif, dorongan agama, tujuan membela atau menyerang, bermain, keuntungan, bantuan terhadap orang lain dan

sebagainya. Hal itu merupakan unsur kehidupan bersama antar individu. Dengan demikian, bahwa *isi* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok atau masyarakat, sedangkan *bentuk* merupakan jenis interaksi dari hubungan sosial yang nyata pada kelompok atau masyarakat yang diwujudkan melalui *Superordinasi* (hubungan dengan bawahan melalui dominasi), *subordinasi* (hubungan dengan atasan melalui ketaatan), kerukunan, persaingan, perwakilan, beladiri, kerjasama, pertentangan dan lain-lain. Bentuk-bentuk semacam itu diwujudkan melalui negara, kelompok keagamaan, perkumpulan, sekolah, keluarga dan lain-lain. Adapun *bentuk* disusun berdasarkan keadaan individu yang terdapat di dalamnya, meliputi :

a. *Proses-proses sosial*

Perilaku yang mendasar dari sekelompok masyarakat yaitu keinginan bersama untuk mewujudkan suatu wadah atau lembaga sosial untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembagian kerja, pembentukan lembaga swadaya masyarakat, kerjasama kelompok, persaingan, pertentangan, rasa kagum, rasa bangga dan lain-lain.

b. *Tipe-tipe sosial*

Memusatkan perhatian pada masyarakat melalui proses interaksi secara khusus pada perilaku atau tindakan yang dipegang (peran) oleh individu yang terlibat di dalamnya, seperti penengah, makelar, wasit, comblang dan lain-lain.

c. *Pola-pola perkembangan*

Merupakan proses sosial yang lebih kompleks, misalnya : Perbedaan sosial, perubahan organisasi sosial dari yang bersifat lokal ke yang bersifat fungsional.

Interaksi sosial paling sederhana sebagai kelompok sosial terkecil dilakukan oleh dua orang yang disebut dengan *Dyad*. Dalam kelompok interaksi sosial yang dilakukan oleh dua orang, maka salah seorang akan tenggelam dalam kedudukan orang kedua, yang disebut sebagai *subordinat* sedangkan orang yang memiliki pengaruh dan mendominasi interaksi sosial tersebut dinamakan *superordinat*. *Dyad* merupakan satu kesatuan perasaan yang terjadi akibat hubungan yang erat dan menyatu, tetapi di dalam *dyad* dapat terjadi suatu pertentangan atau pertikaian (konflik) sebagai akibat dari perasaan yang terganggu oleh tindakan masing-masing, akibatnya mereka memerlukan orang atau pihak ketiga yang berfungsi untuk menetralkan ketegangan yang terjadi. Hadirnya pihak ketiga dapat mempengaruhi terhadap struktur *dyad*. karena pihak ketiga pada umumnya dapat melancarkan pengaruh yang sifatnya netral, sehingga taraf keakraban *dyad* menjadi agak menurun, kemungkinan hal ini terjadi akibat berkurangnya perasaan sebagaimana pernah erat pada dua orang saja, misalnya :

- 1) Apabila di suatu tempat yang sunyi terdapat dua orang yang sedang adu pendapat, tiba-tiba datang orang lain yang dikenal oleh kedua orang tersebut, maka dua orang yang sedang adu pendapat tersebut masing-masing akan menahan emosinya;
- 2) Apabila terjadi percekocokan antara ayah dan ibu di rumah, percekocokan ini sementara akan berhenti jika seorang anaknya datang menghampiri;
- 3) Terdapat dua orang yang serius membicarakan persoalan bersifat pribadi, pembicaraan ini akan berhenti atau dibelokkan ke persoalan lain di saat hadirnya

orang lain.

Interaksi sosial yang dilakukan oleh dua orang (dyad) dapat bertambah menjadi tiga orang, yang disebut *Triad*. Tetapi interaksi sosial yang dilakukan oleh kelompok tiga orang memiliki kecenderungan kurang stabil dibanding dua orang, karena dua pihak akan berhadapan dengan satu pihak dalam membentuk kesatuan, sehingga kedudukan yang menjadi pihak ketiga menjadi terkesampingkan. Pihak yang ditempatkan pada kedudukan ketiga mempunyai status yang tersingkir.

Kecenderungan terjadinya konflik dalam triad merupakan hal yang penting untuk dikaji, karena banyaknya kesempatan pada pihak-pihak dalam triad untuk melaksanakan berbagai peranan. Bentuk triad dapat berubah menjadi dyad apabila terdapat pertentangan sehingga dua orang akan bekerja sama untuk menghadapi satu orang.

Kedudukan pihak ketiga dalam triad mempunyai fungsi dan peranan, yang meliputi :

- a. pihak ketiga dapat memberikan suatu keuntungan yang berfungsi sebagai penengah apabila terdapat pertentangan, tetapi hadirnya pihak ketiga dapat pula menimbulkan pertentangan.
- b. memelihara suasana triad yang harmonis, bagi pihak ketiga memerlukan keterampilan yang tinggi, dengan berusaha untuk memisahkan kepentingan dua pihak dan berusaha agar tidak terjadi kerjasama dua orang.

Lebih luas lagi bahwa interaksi sosial tidak terbatas pada dua atau tiga orang saja, melainkan pada segenap lapisan sosial yang ada di masyarakat. Interaksi sosial sebagai dasar pembentukan kelompok yang dimulai dari dua orang, kemudian 3 orang, yang akhirnya terus meluas menjadi lebih banyak lagi. Bagi kelompok sosial yang lebih teratur akan menunjukkan peranan setiap anggotanya yang berhubungan dengan tujuan bersama. Kelompok sosial ini dikenal oleh orang lain yang berada di luar kelompoknya. Di samping itu terdapat pula kelompok-kelompok sosial dengan ciri tersendiri baik yang terbentuk secara teratur maupun kelompok yang tidak teratur. Walaupun demikian, bahwa setiap kelompok akan menghimpun anggotanya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang sama.

Berdasarkan hubungan antar individu yang terdapat dalam kelompok, maka kelompok sosial dibedakan menjadi :

- 1) *In-group* dan *out-group*. *In-group* adalah kelompok sosial, di mana individu mengidentifikasi dirinya. *Out-group* adalah kelompok sosial yang diartikan oleh individu sebagai lawan dari *in-group*nya, atau individu tidak terlibat dalam suatu kelompok, walaupun ybs bersangkutan kenal dgn anggota kelompok tsb.
- 2) *Primary group* dan *Secondary group*. *Primary group* disebut juga *face-to-face* yaitu kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal dan muncul kerjasama yang erat. *Secondary group* yaitu kelompok terdiri dari banyak orang, hubungan yang terdapat dalam kelompok tersebut atas dasar pengenalan secara pribadi dan sifat kelompo ini tidak kekal.
- 3) *Gemeinschaft* dan *gesselschaft*. *Gemeinschaft* atau paguyuban yaitu bentuk kehidupan bersama, di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni

dan bersifat alamiah serta kekal. dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. *Gessellschaft* atau patembayan yaitu ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka pendek, *gessellschaft* bersifat sebagai suatu bentuk hanya dalam pikiran semata-mata.

- 4) *Formal group* dan *informal group*. *Formal group* yaitu kelompok yang mempunyai aturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan di antara mereka. *Informal group* yaitu kelompok sosial yang tidak memiliki struktur organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok sosial bentuk informal biasanya timbul oleh adanya pertemuan yang berulang-ulang, sehingga menjadi dasar bagi terbentuknya beberapa kepentingan orang yang terlibat di dalamnya, seperti pertemuan di warung atau di tempat-tempat tertentu.
- 5) *Membership* dan *Reference group*. *Membership group* merupakan kelompok sosial di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. *Reference group* yaitu kelompok-kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi individu yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya.

Terdapat beberapa jenis kelompok sosial memiliki perbedaan tingkatan integrasi sebagai ikatan yang menyatukan beberapa individu yang terlibat di dalamnya. Jenis kelompok ini oleh Mannheim (1987 : 117-126) dibedakan menjadi :

1) *Kerumunan*

Kerumunan merupakan pengumpulan individu yang didalamnya terdapat interaksi yang paling longgar. Kerumunan diartikan sebagai kumpulan manusia yang secara fisik kompak, terbentuk secara spontan, sebagian anggotanya bereaksi karena adanya dorongan dan cara yang sama.

Pengorganisasian kerumunan bersifat sementara dan tidak stabil, yang disebabkan oleh adanya suatu insiden yang ditunjang oleh ledakan perasaan, sehingga integrasi kerumunan ini bersifat labil. Individu yang terlibat di dalam kerumunan sebelumnya tidak direncanakan dan masing-masing memiliki kepentingan, mereka berkumpul karena ada sesuatu hal yang dianggap menarik atau ingin mencapai tujuan yang sama tetapi satu sama lain saling terlepas dengan interaksi yang tidak utuh atau lemah sekali. Misalnya orang yang antri karcis, terjadi kecelakaan lalu lintas, penganiayaan di depan umum, dll.

Kerumunan dapat berakibat negatif apabila terdapat dorongan yang dianggap tidak memuaskan setiap individu yang terlibat di dalamnya, sehingga menjadi suatu reaksi spontan dengan bertumpuknya emosi yang tidak terkendali dan dengan cepat kehilangan standar tingkah laku dan kebiasaan sebelumnya. Akibatnya menjadi kerumunan yang tidak teratur karena proses peningkatan emosi dan penurunan kapasitas berfikir. Misalnya, terjadi kerusuhan unsur akibat desas-desus yang dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti seseorang dituduh mencuri oleh pemilik toko padahal yang bersangkutan tidak melakukannya, akibatnya orang-orang di sekitar toko akan bereaksi dengan cara merusak benda-benda yang terdapat di dalam toko tersebut. Kerumunan termasuk kelompok sosial yang tidak teratur.

2) *Publik*

Publik merupakan kesatuan orang banyak yang bukan berdasarkan interaksi perorangan, tetapi atas dasar reaksi terhadap stimulus yang sama. Reaksi muncul tanpa adanya keharusan dekatnya hubungan antar individu yang terlibat di dalamnya. Misalnya, peserta kampanye pemilu, penonton sepakbola, penonton televisi dan lain-lain. Publik tidak dapat disebut kerumunan, karena : (a) mereka memiliki tujuan tertentu, mereka datang atau melihat dengan maksud tertentu; (b) integrasi publik memiliki keteraturan waktu dan tingkah laku yang sama; (c) publik memainkan peran dengan hak untuk menghargai, mengkritik, bahkan mengancam.

Publik dapat menyebabkan kerusuhan seperti halnya kerumunan, karena didasari oleh semangat dan emosi spontan yang muncul bersamaan. Misalnya, penonton sepakbola tidak puas terhadap keputusan wasit yang dianggap merugikan kesebelasan yang didukungnya, maka terjadi pelemparan terhadap kesebelasan lawan, lebih jauh lagi dapat merusak harta benda milik orang lain di luar stadion tempat pertandingan sepakbola tersebut. Dengan demikian, integrasi yang terdapat dalam publik ini hanya bersifat sementara. Seperti halnya kerumunan, publik termasuk kelompok sosial yang tidak teratur.

3) *Massa Abstrak dan Publik Abstrak*

Pirsawan sebagai pendengar radio atau khalayak pembaca surat kabar yang sama, merupakan massa atau publik abstrak, karena mereka mendengar dari stasiun atau surat khabar yang sama tetapi berada di tempat berbeda. Para pembaca atau pirsawan tersebut terbentuk oleh suatu rangsangan yang sama, sehingga akan membentuk reaksi yang sama pula terhadap berita/tajuk yang telah diengar atau dibacanya, walaupun secara fisik/badaniah tidak berdekatan tetapi merupakan suatu publik.

Pembaca atau pirsawan yang membaca atau mendengar media massa yang sama akan menilai atau bereaksi terhadap berita atau tajuk yang disampaikan media massa tersebut, sehingga reaksi tersebut merupakan ukuran untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana integrasi yang dapat dicapai oleh suatu media massa. Dengan demikian, walaupun media massa hanya menyampaikan berita pada langganannya, tetapi dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang terarah, karena masing-masing memiliki ciri khas agar tetap diminati oleh pemirsa atau pembaca sebagai publik abstrak atau pelanggan tsbt, sehingga media massa merupakan sarana untuk mencapai integrasi dari pelanggannya dengan cara mengorganisirnya ke dalam suatu ikatan, misalnya : Kampanye salah satu kontestan pemilu akan menggunakan media massa untuk menawarkan programnya ke masyarakat, dan masyarakat diharapkan dapat memilih tanda gambar kontestan bersangkutan dalam pemilu. Contoh lainnya adalah iklan yang dikemas agar menarik perhatian, sehingga produk yg ditawarkan diharapkan banyak dibeli masyarakat. Begitu pula pemerintah akan menggunakan media massa dalam menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat.

4) *Kelompok Terorganisir*

Tipe kelompok ini berupa integrasi sosial yang agak kekal dibandingkan

dengan kelompok-kelompok sosial yang dijelaskan terdahulu. Setiap anggota kelompok yang terorganisir ini terikat oleh perangkat sosial tertentu sebagai pemersatu. Setiap anggota melakukan reaksi yang sama terhadap suatu rangsangan yang datangnya dari luar maupun dari mereka sendiri.

Kelompok terorganisir menurut Mannheim (1987 : 123-124) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Relatif tetap;
- b) teratur dalam arti adanya pembagian kerja menurut derajat tertentu;
- c) Institusi/pranata sosialnya berdasarkan atas kebiasaan tradisional tertentu dari individu yang membentuk kelompok;
- d) Adanya norma-norma atau standar tertentu. Anggota kelompok menyesuaikan aktivitasnya terhadap norma-norma atau standar kelompok;
- e) Adanya ide-ide tertentu yang menyangkut eksistensi dan fungsi-fungsi kelompok dan hubungan dengan kelompok lain.
- f) Setiap kelompok mempunyai kepentingan kolektif, dan pada waktu bersamaan setiap anggotanya mempunyai kepentingan perorangan dan kepentingan kolektif dalam dirinya;
- g) Setiap kelompok mempunyai organisasi yang berkembang dan sistem pembagian kekuasaan;
- h) Setiap kelompok menciptakan situasi khususnya sendiri dengan serajat ketegangan, penekanan, dan konflik yang khas serta menciptakan badan penindas dan pemecat yang khas pula, misalnya : Keluarga, suku bangsa, marga, komunitas dsb;

Dengan demikian, kehidupan kelompok memiliki jalinan kebersamaan dan ikatan yang dibentuk oleh hal-hal sebagai berikut : *pertama*, terjalin oleh tanggapan, kebiasaan, dan pada institusi sosial yang sama; *kedua*, oleh fungsi-fungsi yang saling melengkapi; *ketiga*, oleh organisasi yang tetap; dan *keempat*, oleh unsur-unsur kesadaran seperti, norma, kepentingan, dan ideologi.

Setiap kelompok akan memiliki bentuk integrasi masing-masing, maka bentuk integrasi yang paling sederhana ditandai oleh sikap kolektif yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, integrasi kelompok yang relatif permanen, disebut sikap institusional; dan *kedua*, sikap kolektif yang disebut sikap non-institusional yakni sikap yang bersifat sementara dan yang dapat berubah.

Adat istiadat sebagai salah satu contoh dari sikap institusional. Adat istiadat menyeragamkan tingkah laku dan cenderung membentuk kebiasaan individu sebagai anggotanya. Kebiasaan adalah cara-cara yang seragam dalam mengerjakan sesuatu dalam kelompok, misalnya mengerjakan sesuatu di bidang rekreasi, kontak sosial atau dalam kehidupan ekonomi. Kebiasaan ini tidak dalam bentuk upacara keagamaan atau upacara-upacara umum.

Kelompok-kelompok sosial yang terorganisir, memiliki banyak bentuk yang tergantung pada tujuan dan cara mengorganisir anggotanya, seperti perkumpulan, perserikatan dan lain-lain.